

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penerapan pengelolaan daerah di Indonesia pada entitas pemerintahan ditandai dengan meningkatnya keingintahuan masyarakat terhadap terciptanya *good government*, yang dapat dilihat dari pengelolaan keuangan daerah diolah dengan baik. Dalam mengontrol kebijakan keuangan daerah, pemerintah terus berupaya menyajikan data yang berkualitas dalam laporan keuangan dengan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Transparansi merupakan kemampuan pemimpin untuk mencari tahu apa yang terjadi dalam pengelolaan keuangan dan aksesibilitas informasi kepada publik (Krah & Mertens, 2020). Menurut Hasnidar (2016) dalam mewujudkan akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah, laporan keuangan digunakan untuk menyampaikan laporan pertanggungjawaban atas keberhasilan ataupun kegagalan terhadap pengelolaan keuangan.

Menurut PP No.8 Tahun 2006 mendefinisikan laporan keuangan sebagai media pertanggungjawaban suatu entitas dalam pengelolaan keuangannya terhadap kinerja keuangan satu periode pelaporan. Tujuan penyusunan untuk memberikan informasi keuangan meliputi laporan realisasi anggaran, laporan posisi keuangan, neraca, laporan arus kas, catatan atas laporan keuangan dengan tetap menjaga laporan keuangan agar tetap akurat yang bermanfaat untuk pengguna laporan dalam pengambilan keputusan mengenai distribusi penggunaan sumber daya yang termuat dalam laporan keuangan (Irzal & Suparno, 2017).

Menurut PP No.71 Tahun 2010 dalam kualitas laporan keuangan, suatu entitas pelaporan seharusnya menyajikan empat kriteria antara lain: andal, relevansi, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami yang berkaitan seluruh informasi transaksi yang tercatat sesuai dengan posisi keuangan dalam satu periode. LKPD (Laporan Keuangan Pemerintah Daerah) setiap tahun akan diperiksa oleh BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) selaku auditor independen yang memeriksa laporan keuangan pemerintah. Hal tersebut bertujuan untuk memeriksa kualitas informasi didalam laporan keuangan yang disajikan oleh entitas. Terdapat lima opini yang diberikan BPK dalam pemeriksaan laporan keuangan antara lain: opini Wajar Tanpa Pengecualian, opini Wajar tanpa Pengecualian dengan paragraph penjelas, Opini Wajar Dengan Pengecualian, Opini Tidak Wajar, Opini Tidak Memberi Pendapat. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah ketika diberikan pendapat WTP atau Wajar Tanpa Pengecualian dapat diartikan laporan keuangan yang disajikan atau diberikan oleh suatu organisasi pemerintah daerah diungkapkan secara berkualitas dan wajar.

Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) merupakan pedoman dalam penyusunan laporan keuangan yang memuat, ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan, efektivitas pengendalian internal serta kecukupan pengungkapan yang dimuat dengan pernyataan pendapat/opini sesuai kriteria dengan pertimbangan tersebut (Ikhsan, 2018). Menurut Mutia Ulfa (2018) buruknya pengelolaan keuangan akan menciptakan kekeliruan dan penyimpangan dalam bidang keuangan yang menimbulkan berbagai tuntutan hukum seperti kolusi,

korupsi. Kualitas laporan keuangan yang baik didukung pula dengan pengendalian internal dan *good governance*.

Fenomena kualitas laporan keuangan pada IHPS (Ikhtisar Hasil Pemeriksaan) Pemerintahan Pusat yang dilakukan BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) terhadap LKPD ditemukan:

1. Tahun 2019 terdapat 2.784 (51%) permasalahan ketidakefisienan, ketidakhematan, sebesar Rp1,35 triliun, 1.725 (31%) permasalahan ketidakpatuhan, 971 (18%) permasalahan kelemahan sistem pengendalian intern. Dalam permasalahan ketidakpatuhan berakibat pada potensi kerugian, dan kekurangan penerimaan.
2. Tahun 2020 BPK menemukan Permasalahan terdiri dari 29 persen ketidakpatuhan, 43 persen ketidakhematan, ketidakefisienan, hingga ketidakefektifan dan 28 persen kelemahan sistem. Pada masalah akibat ketidakpatuhan, BPK melaporkan nilai kerugian mencapai Rp 12,64 triliun yang terdiri dari 2.026 permasalahan.

Fenomena pada Pemerintahan Kabupaten Tapanuli Utara dalam Hasil Pemeriksaan LKPD tahun anggaran 2016 sampai tahun anggaran 2020 memperoleh opini WTP, opini tersebut sudah memenuhi kualitas laporan keuangan namun masih menyisakan permasalahan namun tidak material yang segera ditindaklanjuti seperti:

1. Pada IHPD (Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Daerah) yang diperiksa oleh BPK perwakilan Sumatera Utara pada Pemerintahan Kabupaten Tapanuli Utara yang diterbitkan tahun 2005 s.d 2019, hasil pemantauan terhadap pelaksanaan

TLRHP (Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil) atas LHP ditindaklanjuti oleh entitas dengan penyerahan aset dan/atau penyetoran uang ke kas negara/daerah/perusahaan adalah sebesar Rp16.937.716.812,86. Dari hasil pemantauan penyelesaian ganti kerugian negara/daerah yang harus diselesaikan kepada negara/daerah sebesar Rp204.504.714,42.

2. Dalam Laporan Hasil Pengawasan tahun 2020 yang dilakukan oleh BPKP Sumatera Utara dari hasil ulasan pada APBN 2020 dalam Laporan Konsultan Verifikasi Pelaksanaan Program Hibah Air Minum Perkotaan, ditemukan bahwa Kab. Tapanuli Utara menverifikasi 1.026, total eligible 16, total tidak eligible 18 dan yang belum dapat diambil kesimpulan sejumlah 992 dalam hal itu diberikan pertimbangan dalam rangka pemberian rekomendasi teknis pencairan dana hibah dan tidak ditujukan untuk keperluan lain, dari hasil evaluasi kinerja ditemukan dimana tarif yang lebih tinggi disebagian besar dari harga pokok air dengan NRW standar pada PDAM Mual Natio Kabupaten Tapanuli Utara.

Dari fenomena yang telah dipaparkan bahwa, laporan keuangan pemerintah daerah di Indonesia sudah memenuhi karakteristik kualitatif dalam laporan keuangan pemerintah seperti yang termuat dalam PP 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) walaupun masih terdapat masalah yang perlu ditindaklanjuti. Karakteristik kualitatif sebagaimana yang dimaksud Peraturan Pemerintah pada laporan keuangan diantaranya memenuhi kualitas relevan yang bermaksud laporan keuangan yang disajikan dapat digunakan pemakai dalam menganalisis peristiwa masa lalu dengan masa sekarang, sehingga

mempengaruhi keputusan pengguna untuk memprediksi masa depan. Dapat dipahami yang bermaksud laporan keuangan yang telah disajikan dapat dimengerti oleh pengguna yang telah dirancang sesuai dengan batas pemahaman pengguna. Dapat dibandingkan, yang bermaksud bahwa laporan keuangan dapat dibandingkan dengan periode sebelumnya. Andal berarti, laporan keuangan yang disajikan oleh suatu entitas tidak terdapat kesalahan material atau pengertian yang menyesatkan.

Sistem informasi akuntansi merupakan proses yang didasarkan pada kualitas dari proses, input serta output yang baik. Dengan ketiga aspek tersebut dapat digunakan sebagai dalam pelaporan keuangan yang baik (Kurniawan, 2011). Menurut Ramdany (2015) sistem informasi akuntansi merupakan faktor berpengaruh utama yang menentukan kualitas pelaporan keuangan dalam suatu organisasi ataupun entitas yang didalamnya terdapat pemrosesan informasi yang penting dan sangat dibutuhkan dalam organisasi. Sistem informasi akuntansi adalah kumpulan bagian dan sub sistem yang saling berhubungan satu sama lain dan dengan lingkungan sekitarnya dan beroperasi sebagai satu hubungan yang saling tumpang tindih antara satu sama lain dan antara sistem yang menggabungkannya dimana masing-masing bagian saling bergantung dalam mencapai tujuan yang diinginkan oleh sistem akuntansi yang komprehensif, guna menyediakan data dan informasi kepada pengambil keputusan yang dimiliki sesuai dengan tugas dan tanggungjawab (Adel et al., 2013).

Dalam laporan keuangan sistem informasi dapat digunakan sebagai alat dalam menghasilkan informasi keuangan. Dalam menghasilkan informasi yang berkualitas baik, maka suatu organisasi harus mempunyai sistem informasi

akuntansi yang baik pula. Kualitas sistem informasi yang baik yang disajikan sangat bermanfaat bagi pengguna informasi dalam pengambilan keputusan. Bagian yang bersangkutan seperti bagian akuntansi diharapkan memberikan informasi yang akurat, tepat waktu dan relevan.

Menurut Lif Saipullah (2017) unsur-unsur yang terdapat dalam sistem informasi akuntansi dapat digunakan untuk mendukung kualitas laporan keuangan seperti sumber daya manusia dan alat. Oleh sebab itu membutuhkan sumber daya manusia yang *expert* dalam bidang, keuangan daerah, akuntansi pemerintahan, organisasional pemerintah. Hal tersebut diikuti dengan pemahaman mengenai teknologi yang terkomputerisasi disertai dengan alat yang berfungsi mendukung pelaporan keuangan. Pelaporan keuangan dengan menggunakan teknologi akan menciptakan informasi yang akurat, tepat waktu dan relevan, namun disesuaikan dengan aturan perundang-undangan yang berlaku. Unsur-unsur tersebut menjadi salah satu yang menentukan, dalam meningkatkan kualitas penggunaan sistem informasi akuntansi di pemerintahan daerah. Hal ini didukung oleh penelitian Ramdany (2015) dan Mutia (2018) yang menyatakan sistem informasi akuntansi berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Hasil penelitian tersebut berbeda dari penelitian Asril (2017) yang menunjukkan bahwa pengaruh sistem informasi akuntansi tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan.

Pengendalian internal juga menjadi faktor yang digunakan dalam mendukung kualitas laporan keuangan. Pengendalian internal digunakan untuk melaksanakan tindakan dan aktivitas manajemen dan karyawan lain dalam suatu

entitas untuk menghasilkan informasi keuangan didalam pelaporan keuangan dengan cara yang dapat mencapai tujuan tersebut (Al -Bawab, 2017). Menurut Undang-undang 56 ayat (4) UU nomor 01 tahun 2004 mengatur tentang setiap pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sebagaimana pemakai anggaran melaporkan tentang pengelolaan APBD diinstansi masing-masing sudah diselenggarakan sesuai dengan SAP terhadap laporan keuangan.

Laporan keuangan yang berkualitas dapat dilihat seberapa berhasilnya pengendalian internal yang dimiliki dimasing-masing instansi. Laporan keuangan yang menjadi media pertanggungjawaban yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat atas penggunaan dana atas transaksi yang digunakan (Maramis et al., 2018). Pengendalian internal berfungsi sebagai sumber informasi mengenai aktivitas yang dilakukan organisasi untuk mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi dan membantu dalam pengambilan keputusan yang rasional dan akuntabel. Efektivitas pengendalian internal atas pelaporan keuangan digunakan sebagai acuan mengenai kredibilitas penyusunan laporan keuangan dan pelaporan keuangan untuk tujuan eksternal. Jika terdapat sejumlah kelemahan material, pengendalian internal entitas dapat dianggap tidak efektif. Sistem pengendalian internal diakui sebagai mekanisme pemantauan berharga yang digunakan oleh auditor baik eksternal maupun internal untuk memastikan kredibilitas pelaporan keuangan (Sunday Ajao & Olayemi Oluwadamilola, 2020).

Pengendalian internal selain sebagai alat yang digunakan dalam mendukung kualitas laporan keuangan juga dapat sebagai fungsi yang penting dalam penyelenggaraan pemerintahan, hal tersebut dikarenakan terdapat pengawasan hal

tersebut dimaksudkan agar setiap entitas dapat menyajikan laporan sesuai dengan kejadian yang sebenarnya. Buruknya kualitas pengelolaan laporan keuangan, dapat juga terjadi dikarenakan, pengendalian intern belum sepenuhnya berfungsi dengan optimal. Buruknya kualitas pengendalian internal dapat menimbulkan kurang percayanya dari masyarakat terutama dari kreditur ataupun investor yang menginvestasikan dana ke Indonesia. Dengan hal tersebut baik dari pemerintah pusat/daerah harus dalam penyusunan laporan keuangan harus meningkatkan pengendalian internal. Melalui pengendalian internal yang efektif, kita dapat memahami apakah instansi pemerintah sudah dengan baik menjalankan kegiatan sesuai dengan tanggung jawab dan fungsinya, serta sesuai dengan kebijakan ataupun peraturan yang disepakati (Nur'aini, 2013). Penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian Irzal (2017) dan Ikhsan (2018) yang menyatakan bahwa pengendalian internal berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. Namun, tidak sesuai dengan penelitian Nurani (2018) dan Nurfaufa dan Rahayu (2020) yang menunjukkan bahwa pengendalian internal tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Good governance merupakan suatu ideologi politik yang dijadikan sebagai prinsip tentang pemerintahan untuk dijadikan pegangan dalam menyelenggarakan kehidupan masyarakat. Perkembangan ekonomi dan teknologi acuan dasar dalam menciptakan *good governance*. *Stakeholders* yang terlibat dalam bidang ekonomi, politik dan sosial dalam proses pengelolaan pemerintahan serta terlibat dalam pemberdayaan keuangan maupun sumber daya manusia harus dilaksanakan dengan transparan baik dalam proses penyusunan sampai pertanggungjawabannya hal

tersebut akan menciptakan akuntabilitas dalam pengelolaannya, dalam hal ini bersih, jujur, dan bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme. Hal tersebut juga diikuti dengan penerapan prinsip-prinsip dari *Good Governance*. Pengelolaan keuangan yang baik merupakan salah satu wujud *Good Governance* yang baik (Suprayogi, 2010).

Penerapan *good governance* juga dijadikan pedoman untuk menjalankan asas-asas demokratisasi dan demokrasi dalam pemenuhan hak untuk rakyat dalam berbagai kegiatan kehidupan Negara. Pemerintahan yang baik dapat dikatakan sebagai pemerintah yang menjunjung hak rakyat, memajukan kesejahteraan umum, dan keadilan sosial. Pada saat ini masih ditemukan beberapa pelanggaran dalam penyajian laporan keuangan seperti, penyajian yang kurang akurat ataupun pemalsuan laporan untuk merugikan beberapa pihak, sumber daya yang dikelola kurang efektif, mementingkan kepentingan golongan atau pribadi dari pada kepentingan masyarakat, dan pertanggungjawaban atas aktivitas yang masih lemah. Hal tersebut membuat banyaknya sorotan dari publik yang mampu mendorong suatu organisasi publik untuk menyajikan informasi keuangan dengan jujur sesuai dengan kenyataan agar menciptakan laporan yang berkualitas dan menyadari seberapa pentingnya informasi dari aktivitas transparansi, meningkatkan akuntabilitas, dan pengendalian internal serta penerapan *Good Governance*. Dengan adanya pengelolaan keuangan daerah yang baik bisa memberikan kepastian tentang keberhasilan suatu kegiatan yang mencakup semua perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah (Halim dan Damyanti 2007). Hasil penelitian (2015) yang menghasilkan bahwa

good governance berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan, namun tidak sesuai dengan penelitian Kesuma *et al* (2017) yang menyatakan *Good Governance* tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan.

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian Wili Iskandar (2020). Perbedaan dengan penelitian ini terletak pada periode tahun pengamatan penelitian, variabel serta pada sampel penelitian. Pada penelitian sebelumnya, peneliti menggunakan variabel sistem informasi akuntansi dan sistem pengendalian internal terhadap kualitas laporan keuangan, sedangkan dalam penelitian ini peneliti menambah variabel *Good Governance* sebagai variabel independen. Alasan peneliti menambah variabel *Good Governance* karena secara signifikan berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan seperti pada penelitian Kantu (2015) dan Maramis (2018).

Fokus pada penelitian ini yaitu pada OPD Kabupaten Tapanuli Utara, hal ini berbeda dengan penelitian yang sebelumnya yang berfokus pada OPD Kabupaten Pali. Penulis mengambil variabel tersebut karena masih terdapat berbagai pendapat dengan penelitian sebelumnya. Hal tersebut menjadi alasan lain peneliti untuk meneliti kembali tentang variabel-variabel tersebut pada OPD Kabupaten Tapanuli Utara, serta peneliti ingin mengetahui apakah OPD Kabupaten Tapanuli Utara saat ini telah mampu memberikan kualitas laporan keuangan yang baik dan apakah terdapat pengaruh dari Sistem Informasi Akuntansi, Efektivitas Pengendalian Internal dan *Good Governance* terhadap Kualitas Laporan Keuangan OPD Kabupaten Tapanuli Utara.

Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti melakukan penelitian yang berjudul **“Pengaruh Sistem Informasi Akuntansi, Efektivitas Pengendalian Internal, dan *Good Governance* terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintahan Kabupaten Tapanuli Utara”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, masalah dalam penelitian ini didefinisikan sebagai berikut :

1. Masih ditemukannya beberapa permasalahan dalam laporan keuangan pemerintah daerah yang masih perlu ditindaklanjuti.
2. Masih ditemukannya suatu organisasi publik untuk mengungkapkan informasi secara jujur dalam laporan keuangan, pengelolaan sumber daya yang kurang efektif, serta pertanggungjawaban yang masih lemah.
3. Masih ditemukannya suatu organisasi publik untuk mengungkapkan informasi secara jujur dalam laporan keuangan, pengelolaan sumber daya yang kurang efektif, serta pertanggungjawaban yang masih lemah.
4. Pentingnya penerapan sistem informasi akuntansi, pengendalian internal serta *Good Governance* dalam mendukung kualitas laporan keuangan pemerintah.

1.3 Pembatasan Masalah

Berdasarkan keterbatasan dalam pengerjaan penelitian, terbatasnya waktu untuk penelitian, peneliti hanya membatasi sistem informasi akuntansi, efektivitas

pengendalian internal dan *good governance* terhadap kualitas laporan keuangan OPD Kabupaten Tapanuli Utara pada periode 2019-2020.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka pertanyaan penelitian dirumuskan berikut ini:

1. Apakah Sistem Informasi Akuntansi berpengaruh secara signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan OPD Kabupaten Tapanuli Utara?
2. Apakah Efektivitas Pengendalian Internal berpengaruh secara signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan OPD Kabupaten Tapanuli Utara?
3. Apakah *Good Governace* berpengaruh secara signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan OPD Kabupaten Tapanuli Utara?
4. Apakah penerapan Sistem Informasi Akuntansi, Efektivitas Pengendalian Internal dan *Good Governance* berpengaruh secara bersama-sama terhadap Kualitas Laporan Keuangan pada OPD Kabupaten Tapanuli Utara?

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan pertanyaan, penelitian ini bertujuan untuk menemukan jawaban pertanyaan-pertanyaan antara lain:

1. Mengetahui pengaruh Sistem Informasi Akuntansi terhadap Kualitas Laporan Keuangan OPD Kabupaten Tapanuli Utara.
2. Mengetahui pengaruh Efektivitas Pengendalian Internal terhadap Kualitas Laporan Keuangan OPD Kabupaten Tapanuli Utara.
3. Mengetahui pengaruh *Good Governance* terhadap Laporan Keuangan OPD Kabupaten Tapanuli Utara.

4. Mengetahui pengaruh Sistem Informasi Akuntansi, Efektivitas Pengendalian Internal, dan *Good Governance* berpengaruh secara bersama-sama terhadap Kualitas Laporan Keuangan OPD Kabupaten Tapanuli Utara.

1.6 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini antara lain:

1. Peneliti

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan peneliti mendapat manfaat bagi peneliti itu sendiri, memungkinkan untuk memiliki pemahaman mengenai pengaruh Sistem Informasi Akuntansi, Efektivitas Pengendalian Internal, dan *Good Governance* terhadap Kualitas Laporan Keuangan.

2. Akademik

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan.

3. Peneliti Selanjutnya dan Pembaca

Penelitian ini diharapkan bisa menjadi referensi, pemikiran, pertimbangan, juga acuan saat melakukan penelitian yang hampir sama atau sejenis agar lebih berkembang dan sempurna bagi penelitian selanjutnya.